

**POLITIK ANGGARAN DAN PENGELOLAAN RETRIBUSI
PADA OBJEK WISATA DI ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Oleh :

ROBBY ZUNIANDI
NIM. 150801063



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021**

**POLITIK ANGGARAN DAN PENGELOLAAN RETRIBUSI
PADA OBJEK WISATA ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S.1) Pada Prodi Ilmu Politik

Oleh:

ROBBY ZUNIANDI
NIM. 150801063

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I


Eka Januar, M.Soc. sc
NIP. 198401012015031002

Pembimbing II


Aklima, S.Fil. MA
NIP. 19610670619911011000

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Ilmu Politik

Pada hari / Tanggal
Jumat : 8 Januari 2021
24 Jumadil Awwal 1442 H

Ketua,



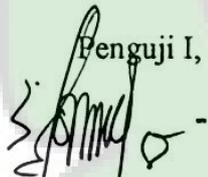
Eka Januar, M.Soc, Sc
NIP. 1984010201531003

Sekretaris,



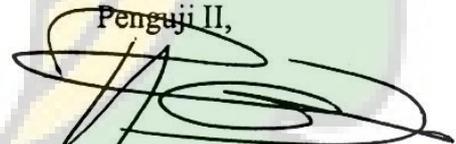
Aklima, S. Fil. I, MA
NIP. 19610670619911011000

Penguji I,



Ranzi Murziqin, MA
NIP. 198605132019031006

Penguji II,



Renaldi Safriansyah, M.HSc
NIP. 2007017903

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam – Banda Aceh




Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 197307232000032002 

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Robby Zuniandi
NIM : 150801063
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

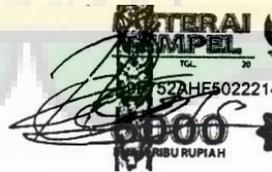
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini,saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini,maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 July 2020
Yang Menyatakan,



52AHE502221462
RIBU RUPIAH

Robby Zuniandi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola kebijakan anggaran dalam sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan dan mengetahui kebijakan alokasi anggaran dalam sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya penelitian deskriptif. Informan penelitian ini terdiri pihak Dinas pariwisata dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Alokasi anggaran untuk pengembangan pariwisata di Kab. Aceh Selatan sangat minim. Pemerintah hanya dapat mengalokasikan dana dalam jumlah terbatas untuk pengembangan kawasan wisata tertentu saja. Dalam 5 tahun terakhir, masih banyak objek wisata yang belum dikembangkan dengan baik. Disamping itu, adanya beberapa hambatan dalam kebijakan pengembangan sektor pariwisata antara lain: interaksi antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat, aspek manajemen pembangunan sarana-prasarana, anggaran, aspek manajemen pemasaran dan promosi dan aspek SDM. Sehingga sangat perlu untuk mengambil upaya dan langkah profesional terhadap manajemen organisasi khususnya dalam desain dan proses penyusunan strategi yang tepat dan efektif. Pola pelaksanaan retribusi objek wisata Aceh Selatan memang secara alami masih memadai namun sangat bagus dan banyak di gandrungi khalayak ramai akan tetapi masih kurangnya bantuan dari pemerintah dalam hal anggaran terhadap pengembangan objek wisata yang ada di Aceh Selatan, hanya beberapa objek wisata yang dapat diterapkan retribusi dalam hal ini dapat berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD), kurangnya kontrol pemerintah dalam mengawasi pengelolaan objek wisata terhadap hal pengawasan juga menjadi suatu hambatan, kurangnya ketegasan pemerintah dalam menerapkan sanksi bagi pelaksana pengembangan objek wisata agar proses administrasinya berjalan baik dan tentunya sanksi kepada oknum-oknum yang melakukan perusakan-perusakan pada objek wisata.

Kata Kunci: *Polik Anggaran, Pengelolaan Retribusi, Objek Wusata, Aceh Selatan*

KATA PENGANTAR



Segala puji dan sukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“POLITIK ANGGARAN DAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PADA OBJEK WISATA ACEH SELATAN”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam yang telah menyempurnakan akhlak manusia dan menuntun umat manusia kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tentunya mendapatkan banyak bantuan dan dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK.MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry
2. Dr. Ernita Dewi, S. Ag., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya

3. Eka Januar, M. Soc, sc sebagai pembimbing I dan Ibu Aklima, S. Fil, MA selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan serta dukungan sehingga terselesainya penulisan skripsi ini.
4. Bapak Hadi Surya ketua Komisi II DPRK Aceh Selatan, Bapak Erwiandi Asisten I Sekretariat Daerah Aceh Selatan, Ibu Nini Anggraini Kasubag Keuangan Dinas Pariwisata Aceh Selatan serta kepada seluruh masyarakat pengelola objek wisata yang telah ikut membantu suksesnya penelitian ini.
5. Terima kasih tak terhingga kepada Ayahanda Miswardi dan Ibunda Zuhaininur, yang telah memberikan do'a serta dukungan baik moril maupun materil dan yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan kepada penulis.
6. Sahabat-sahabat dan semua teman-teman penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
7. Semua teman-teman angkatan 2015 yang telah memberikan saran serta bantuan sehingga terselesainya skripsi ini.

Terima kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kalian semua. Aamiin.

Banda Aceh, 13 July 2020
Penulis,

Robby Zuniandi

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Informasi Penelitian	27
Tabel 4.1 : Perkembang Jumlah Penduduk Aceh Selatan 2017-2020.....	29
Tabel 4.2 : Anggaran Penerimaan Dan Pembangunan Objek Wisata Di Tapaktuan.....	44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Peta Kabupaten Aceh Selatan 2021.....	26
Gambar 5.1 : Dokumentasi.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi

Lampiran 2 : Instrumen Penelitian

Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Penelitian Terdahulu	5
BAB II LANDASAN TEORITIS	10
A. Teori Politik Anggaran	10
B. Teori Kekuasaan	13
C. Realisasi Anggaran	15
D. Kerangka Konseptual	18
BAB III METODE PENELITIAN	19
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	19
B. Lokasi Penelitian	19
C. Fokus Penelitian	19
D. Objek dan Subjek Penelitian	20
E. Sumber dan Jenis Data	21
1. Data Primer	21
2. Data Sekunder	21
F. Teknik Pengumpulan Data	22
1. Wawancara	22
2. Dokumentasi dan Kepustakaan	22
G. Teknik Analisis Data	23
BAB IV PEMBAHASAN	25
A. Gambaran Umum Kabupaten Kabupaten Aceh Selatan	25
B. Pola Kebijakan Anggaran dalam Sektor Pariwisata di Aceh selatan	30

C. Kebijakan Alokasi Anggaran Dalam Sektor Pariwisata Di Kabupaten Aceh Selatan.....	39
BAB V PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu daerah yang berada pesisir selatan provinsi Aceh yang sangat dikenal memiliki destinasi wisata yang menarik selain Kabupaten Aceh Tengah, Sabang dan daerah lain yang dikenal destinasi wisatanya. destinasi wisata yang ada di Kabupaten Aceh Selatan, selalu ramai dikunjungi oleh para pendatang yang berasal mayoritas dari daerah barat selatan provinsi Aceh seperti, Meulaboh, Nagan Raya, Calang, Subulussalam, Blangpidie dan daerah lainnya.

Kabupaten Aceh Selatan di lihat dari potensi alamnya, sektor pariwisata sangat produktif untuk dikembangkan, karena didukung oleh letak geografisnya, ditambah lagi dengan kultur masyarakat lokalnya yang kental dan ramah. Dalam pengembangan pariwisata selamaini, tapaktuan sangat dikenal dengan objek wisata seperti Tapak Tuan yang juga merupakan simbol dari Kota Tapaktuan. Bukan hanya itu, hampir di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan memiliki potensi objek wisata yang baik, namun sayangnya, potensi wisata yang ada di kecamatan maupun di desa kurang di manfaatkan dandikembangkan secara optimal.¹

Dalam upaya mengembangkan berbagai objek wisata di Kabupaten Aceh Selatan tersebut, maka pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah mengambil berbagai kebijakan. Keterlibatan Pemerintah dalam Pengembangan sektor pariwisata memang sangat dominan. Hal ini bukan tanpa sebab, karena pemerintah adalah pihak

¹ Rusnanda, Kajian Potensi dan Rekomendasi Desa Lhokrukamberbasis Desa Wisata, Sebagai Alternatif Pembangunan Kota Tapaktuan, *Jurnal Inotera* Vol.1, No.1, Desember 2016, h. 2.

yang berwenang dan bertanggung jawab mengatur pembangunan di tiap wilayah yang dikelolanya.

Dalam segi prospek tentunya potensi pariwisata tersebut akan terus diawasi oleh pemerintah baik apakah mampu mendongkrak pendapatan desa, maupun proyek apakah yang mampu digali kembali pada potensi pariwisata tersebut. Sedangkan dalam secara norma juga tetap diawasi oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mencegah hal-hal menyimpang seperti penyalahgunaan tempat wisata baik dilakukan oleh pengunjung maupun pihak masyarakat. Hal ini juga dilakukan untuk meminimalisir perbuatan yang meresahkan dan menjaga kenyamanan baik pengunjung maupun masyarakat lokal destinasi wisata.

Dalam usaha pengembangan sektor pariwisata, pemerintah tidak berjalan sendiri dalam berkontribusi mengembangkan sektor pariwisata. Sebab dalam pengembangan sektor pariwisata butuh komponen-komponen lain untuk lebih bersinergi membangun dan mengembangkan sektor pariwisata. Dalam upaya pengembangan pariwisata, pemerintah bertanggung jawab mengaplikasikan program yang dicanangkan untuk pengembangan sektor pariwisata khususnya di Tapaktuan, namun masih terdapat sejumlah tantangan pengembangan sektor pariwisata di Tapaktuan.

Dalam upaya pengembangan sektor pariwisata, pembenahan infrastruktur, sarana dan prasarana merupakan hal utama yang dilakukan untuk meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Sebab, walaupun kegiatan promosi dengan genjarnya dilakukan diluar tanpa melakukan pembenahan didalam, itu sama saja membuat minat wisatawan semakin menurun. Sebab selama ini infrastruktur, sarana

dan prasarana yang ada masih kurang dimata wisatawan. Dengan adanya pembenahan dari dalam terlebih dahulu, maka objek-objek wisata yang ada di dalamnya juga berkembang. Kemudian barulah melakukan kegiatan promosi dengan basis sosial media dan basis teknologi.

Selain itu, kegiatan promosi yang dilakukan pihak Dinas Kebudayaan Pariwisata juga masih sangat minim, salah satunya dengan acara pemilihan duta wisata Aceh Selatan. Selain itu juga pemerintah berencana membuat acara atau event budaya di luar Aceh Selatan seperti di Banda Aceh atau Medan, Namun untuk rencana yang satu ini belum terlaksana sampai sekarang.

Pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih terus dilaksanakan walaupun dengan keterbatasan dana dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) belum bisa diterapkan sebagai bagian kebijakan pemerintah terhadap sektor pariwisata. Selain itu juga akibat dari kekurangan ini membuat daya tarik wisatawan terhadap sektor pariwisata dan industri yang terlibat didalamnya tidak begitu berkembang.

Meskipun demikian, pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan ternyata tidak ikut mempengaruhi pendapatan yang didapat oleh pemerintah Aceh Selatan dibidang Sektor Pariwisata. Hal ini memang secara potensi Kota Tapaktuan itu memang layak dikatakan sebagai kota wisata, dan kelayakan itu membuat sector pariwisata mengalami kemajuan walaupun tidak terlalu besar.

Oleh karena itu sangat penting dilakukan kajian terkait politik anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Aceh Selatan dalam bidang pengembangan objek wisata. Hal

ini yang membuat penelitian ini melakukan penelitian dengan judul berjudul **“Politik Anggaran dan Pengelolaan Retribusi Pada Objek Wisata di Aceh Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola kebijakan anggaran dalam sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan ?
2. Bagaimana kebijakan alokasi anggaran dalam sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Senada dengan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pola kebijakan anggaran dalam sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui kebijakan alokasi anggaran dalam sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Kajian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Akademis

Secara teoritis kajian ini dapat bermanfaat:

- a. Penambah wawasan pengetahuan politik sebagai serta dijadikan bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut terkait politik anggaran dan pengelolaan retribusi pada objek wisata di Aceh Selatan.
- b. Memperkaya koleksi perpustakaan, khususnya pada perpustakaan FSIP UIN Ar-Raniry, sehingga dapat menyumbang perkembangan pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis kajian ini dapat bermanfaat kepada beberapa pihak.

- a. Secara praktis, dengan tulisan ini penulis berharap dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana politik anggaran dan pengelolaan retribusi pada objek wisata untuk direalisasikan secara menyeluruh.
- b. Bagi pemerintah dan masyarakat kajian ini dapat menjadikan masukan agar ke depan terus meningkatkan dukungan terhadap berbagai kebijakan yang menyangkut pengembangan objek wisata di Kabupaten Aceh Selatan.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan, dalam penelitian ini akan dicantumkan hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti di antaranya:

Kajian yaang ditulis oleh Helln Angga Devy dan R.B Soemanto dalam tulisannya yang berjudul "*Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata Alam Sebagai Daerah Tujuan Wisata di Kabupaten Karanganyar*" dalam tulisannya, penulis menjelaskan strategi yang dilakukan dalam mengembangkan Objek Daya Tarik Wisata Air Terjun Jumog adalah dengan membuat kebijakana-kebijakan yang telah direncanakan olehn BUMDes Berjo dan di dukung oleh pemerintah Desa,

pemerintah daerah serta para pelaku wisatawan yang ada di daerah tersebut. Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Jumog yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa 'Berjo' secara fisik ialah dengan menambahkan dan memperbaiki beberapa fasilitas dan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pariwisata di Objek Wisata Air Terjun Jumog. Sedangkan pengembangan non-fisik yang dilakukan adalah dengan membentuk beberapa unit diantaranya adalah unit loket, prasarana, kebersihan, musik, keamanan dan warung makan yang seluruhnya memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengelola keberlangsungan aktifitas objek dan memberikan pelayanan kepada setiap wisatawan yang mengunjungi Objek Wisata Air Terjun Jumog.²

Kedua, Rotua Kristin sinamora dan Rudi Salam Sinaga, dalam tulisannya yang berjudul, "*Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara*" dalam tulisannya, penulis menjelaskan pengembangan pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara mengacu pada beberapa konsep, seperti: konsep pembangunan berkelanjutan, pengembangan pariwisata dengan tetap mempertimbangkan potensi pasar manca negara dan domestik serta tetap memperhatikan tanggung jawab para pelaku pariwisata terhadap kelestarian dan pelestarian sumber daya pariwisata yang ada. Peran pariwisata dalam pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara dominan sebagai fasilitator di bandingkan dengan peran lainnya yaitu sebagai motivator dan dimanisator. Peran sebagai fasilitator disini hal utama dalam penyediaan sarana dan prasarana objek yang sebagian besar masih di tanggung oleh dinas, fasilitas penyaluran bantuan dana

² Heln Angga Devy dan R.B Soemanto, *Jurnal Sosiologi DILEMA*, Vol. 32, No. 1 Tahun 2017

stimulan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan sebuah objek wisata, upaya-upaya promosi objek wisata, serta fasilitas yang diberikan pada pihak ketiga seperti investor dan pengusaha wisata untuk mengembangkan usaha wisata di Kabupaten Tapanuli Utara.³

Ketiga, Oman Sukirman, dalam tulisannya yang berjudul, “*Apakah Anggaran Pemasaran Pariwisata Pemerintah Efektif dalam Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata*”, dalam tulisannya, penulis menjelaskan bahwa anggaran pemasaran pariwisata telah efektif dalam meningkatkan jumlah wisatawan. Terdapat hubungan yang erat antara anggaran pemasaran terhadap jumlah kunjungan wisatawan dan besarnya pengaruh anggaran pemasaran terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Jumlah kunjungan wisatawan, dan besarnya pengaruh anggaran pemasaran terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Namun adanya kekurangan dalam penelitian ini dari sisi terbatasnya data dan hanya membandingkan anggaran pemasaran pariwisata dan jumlah kunjungan wisata sehingga tidak mampu menggambarkan dampak anggaran pariwisata tersebut pada pertumbuhan ekonomi negara. Sehingga dapat diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat mengkaji pada efektifitas anggaran pemasaran pariwisata dengan melihat berbagai aspek yang menjadi sasaran dari kegiatan pariwisata itu sendiri, misalnya dikaitkan dengan kontribusinya pada pertumbuhan PNB, perolehan devisa dan jumlah lapangan kerja.⁴

Keempat, Ian Asriandy dalam tulisannya yang berjudul, “*Strategi Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Bissapu di Kabupaten Bantaeng.*” Dalam

³ Rotua Kristin Sinamora dan Rudi Salam Sinaga, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 4 (1) (2016): 79-96

⁴ Oman Sukirman, “Tourism and Hospitality Essentials (THE)” *Journal*, Vol. 7, No. 2, 2017 - 121

tulisannya, penulis menjelaskan beberapa implementasi strateg iyang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISPUDBAR) terkait strategi yang teridentifikasi yaou strategi sebagai rencana dengan melihat potensi dari Objek Wisata Air Terjun Bissapu ialah pengembangan yang dilakukan terfokus pada satu titik agar kiranya pengembangan yang dilakukan akan terlihat hasilnya. Adanya melibatkan semua elemen baik pemerintah maupun masyarakat sehingga pengembangan tersebut dapat membuahkan hasil yang maksimal. Dengan menyusun segala perncanaan secara menyeluruh terhadap objek wisata yang akan dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Melakukan pelatihan-pelatihan baik pemandu wisata, pelaku wisata dan pengelola wisata dan koordinasi yang terus dilakukan kepada pemerintah dan masyarakat sekitar objek wisata. Hal ini terjadinya kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat terhadap pengembangan objek wisata Air Terjun Bissapu di Kabupaten Bantaeng.⁵

Kelima, Marliyani dalam tulisannya yang berjudul, “*Politik Anggaran dalam Kebijakan Infrastruktur di Kabupaten Tanggamus Tahun 2015*”. Dalam tulisannya, penulis menjelaskan politik anggaran dalam kebijakan infrastruktur di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2015 tidak terlepas dari adanya kepentingan politik dari pihak-pihak terkait yaitu eksekutif dan legislatif. Yang terlihat pada proses *Agenda setting* dalam perumusan kebijakan anggaran infrastruktur dan penentuan alokasi anggaran di Tanggamus melibatkan multi aktor yaitu DPRD dan eksekutif tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politiknya masing-masing. DPRD yang memiliki fungsi *budgeting* memiliki keleluasan dalam hal pengalokasian anggaran

⁵ Ian Asriandy, Skripsi: *Strategi Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Bissapu Di Kabupaten Bantaeng*, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2016), Hal. 103.

infrastruktur, dimana anggota legislatif sering mengusulkan anggaran-anggaran untuk kegiatan yang ada kesan bahwa anggaran diartikan dengan kinerja sehingga legislatif akan berusaha semaksimal mungkin agar daerahnya bisa mendapatkan alokasi anggaran Fisik.⁶



⁶ Marliyani, Skripsi: *Politik Anggaran dalam Kebijakan Infrastruktur di Kabupaten Tanggamus tahun 2015*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016), hal. 104.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

Landasan teoritis ini di sebagian literatur penulisan karya ilmiah disebut juga sebagai landasan teoritis, dan kerangka konseptual dengan berdasarkan teori yang digunakan maka akan memecahkan masalah yang dikaji, penelitian ini mencoba menjawab permasalahan politik anggaran dan pengelolaan retribusi pada objek wisata di Aceh Selatan, dengan menggunakan teori politik anggaran sebagai teori utama dalam penelitian ini.

A. Teori Politik Anggaran

Anggaran merupakan instrumen kebijakan yang dimiliki oleh Pemerintah untuk menggambarkan pernyataan komprehensif tentang prioritas negara. Anggaran juga mempunyai pengertian sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran *financial*.⁷

Tahap penganggaran menjadi sangat penting, karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Sehingga tujuan dari penganggaran harus dipahami oleh perumus kebijakan anggaran, yaitu anggaran harus berbasis kinerja dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Dengan demikian setiap anggaran belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah harus dapat dipertanggung-jawabkan kinerjanya, sehingga setiap belanja harus berdasarkan pada usaha untuk mewujudkan tercapainya tujuan pemerintah daerah.

⁷ Setiawan, Andik. Politik Anggaran: Kebijakan Dana Bagi Hasil Migas dalam APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015. *Jurnal Politik Indonesia*. Vol.2 No.1, Juli-September 2017.

Politik bisa terlibat dalam segala urusan kenegaraan, termasuk didalamnya urusan finansial publik, baik itu dalam perencanaan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi. Teori politik keuangan negara yang baik adalah relatif tergantung ideologi suatu negara, artinya teori politik keuangan negara yang baik bagi suatu negara belum tentu baik bagi negara lain. Aktivitas politik dalam keuangan negara tergantung pada derajat demokrasi, yang memberi keleluasaan/kebebasan aktivitas politik dalam suatu Negara.⁸ Ada 2 golongan besar yang membedakan aktivitas politik dalam keuangan negara:

1. Negara dengan sistem otokrasi, yakni suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang atau kelompok kecil (oligarki). Yakni negara yang berbentuk monarki, sosialis, theokrasi, dan sebagainya, dimana segala aktivitas negara dipegang sepenuhnya oleh penguasa negara. Aktivitas politik sangat minim, meskipun ada biasanya berupa gerakan bawah tanah.
2. Negara dengan sistem demokrasi, yakni suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Aktivitas politik sangat besar, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara, sebagaimana negara penganut liberalisme, globalisme, kapitalisme, termasuk ideologi Pancasila sebagai ciri khas Indonesia.⁹

Pemerintah sebagai sebuah institusi publik dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan sumber dana atau modal untuk dapat membiayai pengeluaran pemerintah tersebut (*government expenditure*) terhadap barang barang publik (*public goods*) dan jasa pelayanan. Tugas ini berkaitan erat dengan kebijakan anggaran pemerintah yang meliputi penerimaan dan pengeluaran. Pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, memerlukan dana yang cukup dan terus meningkat sesuai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat,

⁸ Bambang Utoyo, *Bahan Kuliah Politik Keuangan Negara*, Lampung : Unila, 2013), h. 5

⁹ Bambang Utoyo, *Bahan Kuliah Politik Keuangan Negara...*, h. 7-8.

kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dana tersebut diperoleh dari kemampuan menggali sumber keuangan sendiri didukung oleh perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai sumber pembiayaan. Oleh karena itu keuangan daerah merupakan tolak ukur bagi penentuan kapasitas dalam menyelenggarakan tugas-tugas otonomi, disamping tolak ukur lain seperti kemampuan sumber daya alam, kondisi demografi, potensi daerah, serta partisipasi masyarakat.¹⁰

Menurut Mardiasmo dalam upaya pemberdayaan pemerintah daerah saat ini, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan public (*public oriented*). Hal tersebut tidak hanya terlihat dari besarnya pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tapi juga terlihat dari besarnya partisipasi masyarakat (DPRD) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.
2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya.
3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran serta dan partisipasi yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti: DPRD, Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, dan Perangkat Daerah lainnya.
4. Kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan mekanisme pasar, transparansi dan akuntabilitas.
5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, Kepala Daerah dan PNS, baik rasio maupun dasar pertimbangannya.
6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multi tahunan.
7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang-barang daerah yang lebih profesional.
8. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, peran akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, serta transparansi informasi anggaran kepada publik.
9. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah.

¹⁰ Wildavsky, *Dinamika Proses Politik Anggaran*, (Yogyakarta : Matapena Consultindo, 2012), h. 13

10. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebaran informasi, sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta mempermudah mendapatkan informasi.¹¹

B. Teori Kekuasaan

Kekuasaan merujuk pada adanya kemampuan untuk memengaruhi dari seseorang kepada orang lain. Atau dari satu pihak kepada pihak yang lain.¹² Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi pikiran atau tingkah laku orang atau kelompok orang lain, sehingga orang yang dipengaruhi itu mau melakukan sesuatu yang sebetulnya orang itu enggan melakukannya. Bagian penting dari pengertian kekuasaan adalah syarat adanya keterpaksaan, yakni keterpaksaan pihak yang memengaruhi.¹³

Kekuasaan pada dasarnya dianggap sebagai suatu hubungan, karena pemegang kekuasaan menjalankan kontrol atas sejumlah orang lain. Pemegang kekuasaan bisa jadi seseorang individu atau sekelompok orang, demikian juga obyek kekuasaan bisa satu atau lebih dari satu. Menurut (Walter S. Jones, 1993, hal. 3) kekuasaan dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Kekuasaan adalah alat aktor-aktor internasional untuk berhubungan satu dengan lainnya. Itu berarti kepemilikan, atau lebih tepat koleksi kepemilikan untuk menciptakan suatu kepemimpinan.
2. Kekuasaan bukanlah sribut politik alamiah melainkan produk sumber daya material (berwujud) dan tingkah laku (yang tidak berwujud) yang masing-masing menduduki posisi khusus dalam keseluruhan kekuasaan seluruh aktor.

¹¹ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi, 2002), h. 26-27.

¹² Robert, *Modern Political Analysis*, (New Delhi: Prentice-Hall of India Private Limited, 1974), h. 29.

¹³ Mas'oed dan Nasikun, *Sosiologi Politik*, (Yogyakarta: PAU – Studi Sosial UGM, 1987), h. 22.

3. Kekuasaan adalah salah satu sarana untuk menancapkan pengaruh atas aktor-aktor lainnya yang bersaing menggapai hasil yang paling sesuai dengan tujuan masing-masing.
4. Penggunaan kekuasaan secara rasional merupakan upaya untuk membentuk hasil dari peristiwa internasional untuk dapat mempertahankan atau menyempurnakan kepuasan aktor dalam lingkungan politik internasional.

Kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, sekelompok orang atau suatu negara terhadap pihak lain, dapat membuat penguasa tersebut berupaya untuk mencapai apa yang menjadi keinginan dan tujuannya. Cara untuk mempertahankan kekuasaan dapat dilakukan dengan cara damai, antara lain dengan demokrasi dan mencari dukungan pihak lain, atau dengan kekerasan, antara lain dengan penindasan dan memerangi pihak yang menentang kekuasaannya. Dalam masyarakat yang tidak demokratis atau masyarakat yang dipimpin oleh seorang yang diktator, penguasa mempertahankan kekuasaannya dengan paksaan. Di dalam masyarakat yang tidak demokratis, ada kecenderungan penguasa untuk masuk terlalu jauh dalam mengatur kehidupan dan kepercayaan serta pribadi warganya sesuai dengan keinginan penguasa. Dengan paksaan, warga ditujukan untuk patuh pada penguasa.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan, meskipun dalam mempertahankan kekuasaan ada berbagai macam cara, namun terdapat beberapa persamaan yaitu pihak satu ingin selalu memerintah pihak lain. Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa otoritas penguasa adalah hak, kekuasaan dan wewenangnya sah diberikan padanya untuk membuat peraturan yang harus ditaati atau diikuti pihak lain atau kekuasaan dan wewenang yang sah untuk membuat orang atau pihak lain bertindak sesuai dengan yang diinginkan penguasa.

¹⁴ Haryanto, *Kekuasaan Elit : Suatu Bahasan Pengantar*, (Yogyakarta, Politik Lokal dan Otonomi Daerah, 2005), h. 53.

C. Realisasi Anggaran

Menurut Mardiasmo realisasi adalah proses menjadikan nyata, perwujudan, pelaksanaan yang nyata.¹⁵ Menurut Nordiawan realisasi adalah proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi dapat sesuai dengan harapan diinginkan.¹⁶

Anggaran adalah “suatu alat perencanaan dan pengendalian yang efektif di dalam organisasi, yang bersifat jangka pendek biasanya mencakup periode satu tahun. Supriyono mengungkapkan bahwa anggaran adalah “suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif untuk menunjukkan bagaimana sumber-sumber akan diperoleh dan akan digunakan selama jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun”.¹⁷

Anggaran juga dapat diartikan sebagai “rencana yang diwujudkan dalam bentuk finansial, yang meliputi atas usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk satu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut”.¹⁸ Sedangkan menurut Rudianto anggaran adalah “rencana kerja organisasi di masa yang akan datang dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis. Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, anggaran dapat diartikan sebagai sebuah rencana kerja yang berbentuk kuantitatif, formal, dan sistematis, yang meliputi usulan atas pengeluaran yang telah diperkirakan dalam satu periode”.¹⁹

¹⁵ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2009), h. 21.

¹⁶ Nordiawan, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Kedua*. (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 155.

¹⁷ Supriyono, *Akuntansi Manajemen. Edisi Ketiga*. (Yogyakarta: BPFE UGM, 2009), h. 55

¹⁸ Abdul Halim dkk, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2012), h. 22.

¹⁹ Rudianto, *Penganggaran*, (Jakarta : Erlangga, 2009), h. 3

Berdasarkan keterangan di atas, maka anggaran memiliki dua peran penting di dalam sebuah organisasi, yaitu pertama berperan sebagai alat perencanaan dan kedua berperan sebagai alat pengendalian. Sebagai sebuah rencana tindakan, anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan organisasi atau unit organisasi dengan cara membandingkan hasil yang sesungguhnya yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jika hasil yang sesungguhnya yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jika hasil sesungguhnya berbeda secara signifikan dari rencana, tindakan tertentu harus diambil untuk melakukan revisi yang perlu terhadap rencana. Dari definisi tersebut dapat diambil intinya, yaitu:

1. Anggaran harus bersifat formal, artinya anggaran harus disusun dengan sengaja dan bersungguh-sungguh dalam bentuk tertulis
2. Anggaran harus bersifat sistematis, artinya bahwa anggaran disusun dengan berurutan dan berdasarkan suatu logika.
3. Setiap manajer dihadapkan pada suatu tanggungjawab untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu anggaran merupakan suatu hasil pengambil keputusan yang berdasarkan beberapa asumsi tertentu.
4. Keputusan yang diambil manajer tersebut merupakan fungsi manajer dari segi perencanaan, koordinasi dan pengawasan.²⁰

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan, maka anggaran sangat diperlukan dalam suatu pemerintahan desa, berikut adalah beberapa fungsi anggaran. Seluruh fungsi anggaran di dalam suatu organisasi pemerintahan dapat dikelompokkan ke dalam empat fungsi pokok, yaitu fungsi:

1. *Planning* (Perencanaan), di dalam fungsi ini ditetapkan tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, sasaran yang ingin dicapai, strategi yang akan digunakan dan sebagainya. Di dalam fungsi ini berkaitan dengan segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai di masa mendatang termasuk di dalamnya menetapkan produk yang akan dihasilkan, dan bagaimana menghasilkannya, sumber daya yang dibutuhkan untuk

²⁰ Abdul Halim dkk, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2012), h. 22.

menghasilkan produk tersebut, bagaimana memasarkan produk tersebut dan sebagainya.

2. *Organizing* (pengorganisasian), setelah segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan di masa depan telah ditetapkan, maka harus mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana yang telah tersebut. Dimulai dari upaya memperoleh bahan baku, mencari mesin yang dibutuhkan untuk mengelola bahan tersebut, bangunan yang dibutuhkan untuk mengelola produk tersebut, mencari tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan, mencari modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang direncanakan dan sebagainya.
3. *Actuating* (menggerakkan), setelah sumber daya yang dibutuhkan diperoleh, maka tugas manajemen selanjutnya adalah mengarahkan dan mengelola setiap sumber daya yang telah dimiliki tersebut agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing.
4. *Controlling* (pengendalian), setelah sumber daya yang dibutuhkan perusahaan diperoleh dan diarahkan untuk bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing, maka langkah berikutnya adalah memastikan bahwa setiap sumber daya tersebut telah bekerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat untuk menjamin bahwa tujuan secara umum dapat dicapai.²¹

Sedangkan menurut Sasongko dan Parulian fungsi anggaran yaitu sebagai berikut:

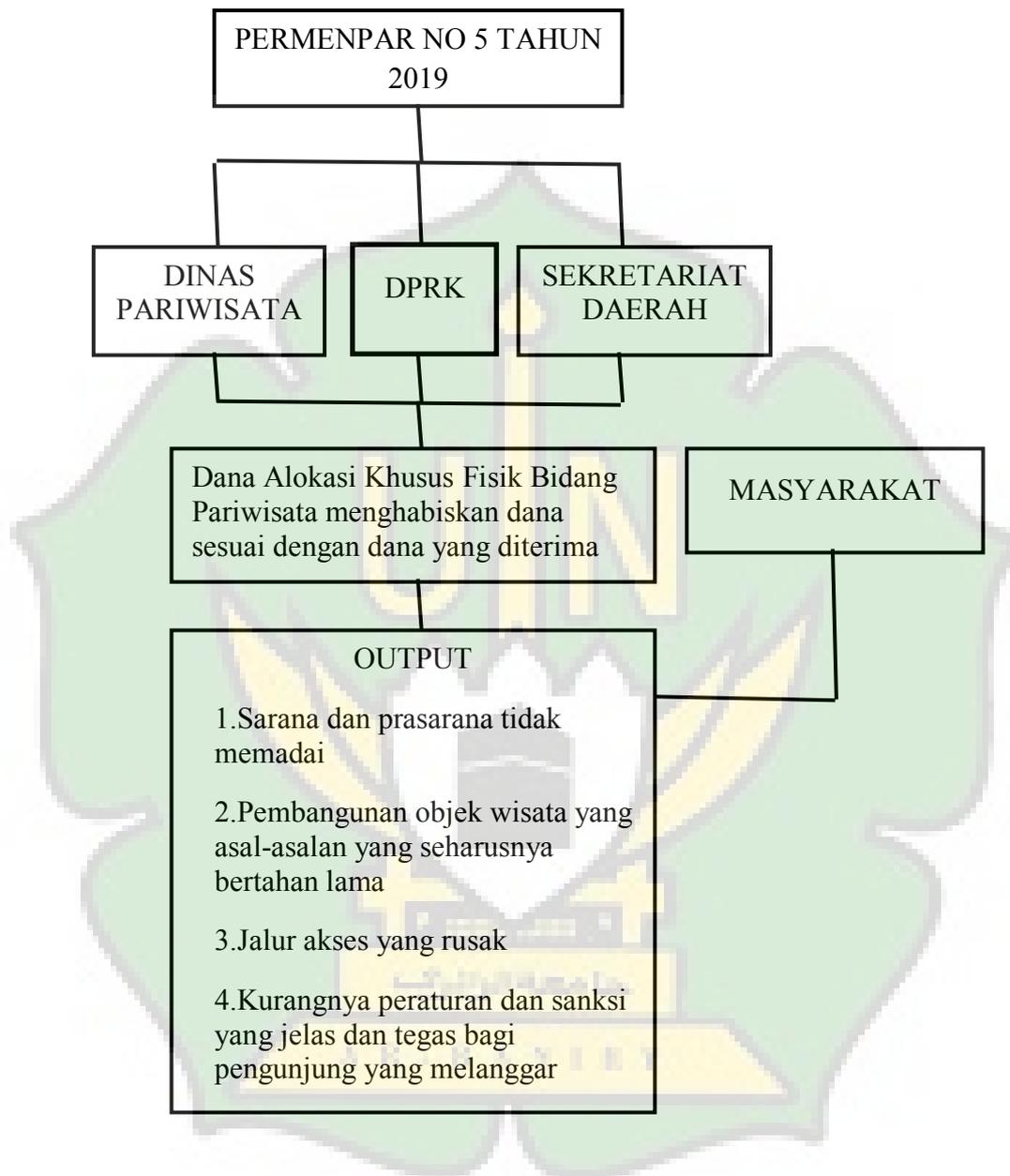
1. Perencanaan, anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan.
2. Koordinasi, anggaran dapat mempermudah koordinasi antarbagian-bagian di dalam perusahaan.
3. Motivasi, anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target-target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan.
4. Pengendalian, keberadaan anggaran di perusahaan memungkinkan manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian atas aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan di dalam perusahaan.²²

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi anggaran memiliki fungsi yang terkait dengan fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi menggerakkan dan fungsi pengawasan.

²¹ Nafarin, *Penganggaran Perusahaan. Edisi ketiga, Cetakan kedua, Buku. 1.* (Jakarta : Salemba Empat, 2013), h. 45-46

²² Sasongko Catur dan Parulian, *Anggaran*, (Jakarta: Salemba. Empat, 2013), h. 78

D. Kerangka Konseptual



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.²³ Penyajian penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.²⁴

Penelitian *deskriptif* adalah upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain, penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antar variabel-variabel yang ada.²⁵

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat berlangsungnya penelitian itu sendiri, Adapun penelitian ini dilakukan langsung di Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di Dinas Keudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan.

C. Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus penelitian dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk

²³ Moleong Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2006), h. 4.

²⁴ Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), h. 67.

²⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). h. 26.

memenuhi kriteria inklusif-eksklusi atau memasukkan-mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan.²⁶ Adapun yang menjadi fokus penelitian ini ialah pola kebijakan anggaran dalam sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan dan kebijakan alokasi anggaran dalam sector pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan.

D. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ialah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut tidak tergantung pada judul dan topik penelitian tetapi secara konkret tergambar-kan dalam rumusan masalah penelitian.²⁷ Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah pola kebijakan anggaran dalam sektor pariwisata dan kebijakan alokasi anggaran dalam sector pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan.

Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sampel atau subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.²⁸ Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.²⁹

Informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.³⁰ Adapun yang

²⁶ Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004), hlm 16

²⁷ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), h. 78.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 171.

²⁹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Erlangngga, 2009), h. 92.

³⁰ Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 67.

menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri dari pihak Dinas Pariwisata, Sekretaris Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan dan Masyarakat.

E. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.³¹ Data primer dapat berupa data lisan maupun data secara tulisan. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan kunci dan dokumentasi berupa laporan data anggaran belanja modal pariwisata dan penerimaan pendapatan pemerintah Aceh Selatan dari objek wisata yang didapatkan pada buku APBD Kabupaten Aceh Selatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.³² Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artiker dan situs internet.

³¹ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya,...)*, h. 132.

³² Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial...h.56.*

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Studi dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang teliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan bukan berdasarkan perkiraan.³³ Adapun dokumen yang digunakan berupa laporan tahunan anggaran modal belanja pariwisata dan penerimaan pendapatan pemerintah Aceh Selatan dari objek wisata yang didapatkan pada buku APBD Kabupaten Aceh Selatan.

2. Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.³⁴ Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih untuk memperkuat data yang diperoleh untuk dokumentasi. Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini sebagaimana pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Pihak	Jumlah
1	Dinas Pariwisata	1
2	Sekretaris Daerah	1
3	Anggota DPRK Kabupaten Aceh Selatan	1
4	Masyarakat	3

³³ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

³⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial...*, h. 118.

Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yakni sebagai berikut:

Pertama, Membangun kajian, pada tahap ini cara yang mudah bergerak maju adalah memecah-mecah inovasi ke dalam komponen-komponen atau aspek-aspek khusus, dengan menggunakan ini sebagai baris matriks. Kolom matriks adalah jangka-jangka waktu, dari penggunaan awal sampai penggunaan nanti. Jika terjadi perubahan dalam komponen selama jangka waktu itu, kita dapat memasukkan deskripsi singkat dari perubahan itu.³⁵

Kedua, memasukkan data. Pada tahap ini, penganalisis sedang mencari perubahan-perubahan dalam inovasi itu, komponen demi komponen. Perubahan-perubahan itu dapat ditempatkan dalam catatan-catatan lapangan wawancara dengan para pengguna inovasi yang sudah terkode, yang ditanyai secara khusus apakah mereka telah membuat suatu yang sudah terkode dalam format buku inovasi. Kelanjutan penyelidikan menurut adanya bagian-bagian yang telah ditambah, didrop,

³⁵ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), h. 173-174.

diperbaiki, digabungkan, atau diseleksi untuk digunakan. Dalam beberapa hal dapat mengacu pada bukti-bukti dokumenter.³⁶

Ketiga, menganalisis data. Pada tahap ini, penganalisis dapat memahami lebih dalam mengenai apa yang terjadi dengan mengacu kembali pada aspek-aspek lain dari catatan lapangan, khususnya apa lagi yang dikatakan orang mengenai perubahan itu atau alasan-alasannya.³⁷



³⁶ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi..., h. 174.

³⁷ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi...,h. 177.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Selatan

1. Geografis dan Wilayah Administratif Kabupaten Aceh Selatan

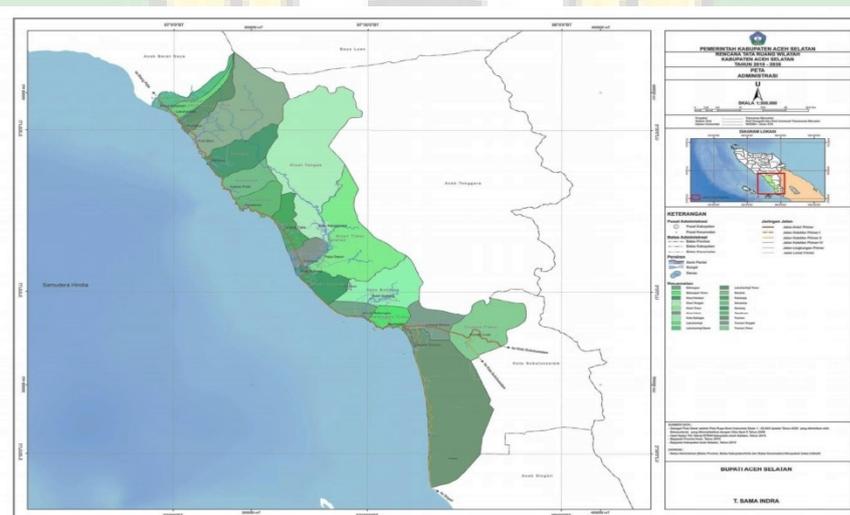
Wilayah Kabupaten Aceh Selatan terletak di pantai barat – selatan Provinsi Aceh yang berada di ujung utara Pulau Sumatera. Berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:50.000, wilayah daratan Kabupaten Aceh. Kabupaten Aceh Selatan dengan ibukotanya Tapaktuan, merupakan salah satu daerah pesisir tertua di Aceh. Kabupaten yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 dalam sejarah pembentukannya telah dilakukan sejak tanggal 10 Oktober 1945 (lihat kotak 1). Kabupaten Aceh Selatan berada di wilayah pantai barat-selatan Aceh dan terletak antara 20-40 Lintang Utara (LU) dan 960-900 Bujur Timur (BT).

Dari sisi letaknya, kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, di sebelah Utara. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil. Di sebelah Barat, berbatasan dengan Samudera Hindia. Dan, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan kedudukan ini, memudahkan bagi Kabupaten Aceh Selatan melakukan aktivitas dan transaksi ekonomi dengan wilayah sekitarnya, seperti Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Kabupaten Aceh Singkil. Kondisi ini tidak terlepas dari tersedianya sarana dan prasarana transportasi darat yang cukup memadai di wilayah pantai barat- selatan.

Selain itu, Kabupaten Aceh Selatan juga menjadi salah satu pintu gerbang utama menuju ke Kabupaten Simeulue, sehingga memberikan peluang yang cukup besar menjadi pemasok kebutuhan pangan ke Simeulue. Posisi strategis yang dimiliki Kabupaten Aceh Selatan juga membuka peluang dan memungkinkan transaksi perdagangan dengan daerah lainnya yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Wilayah Kabupaten Aceh Selatan secara geografis terletak pada 020 23' 24" – 030 44' 24" LU dan 960 57' 36" – 970 56' 24" BT. Dengan batas-batas wilayah adalah: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara, sebelah timur berbatasan dengan Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya.



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Aceh Selatan, 2021
(Sumber: Kabupaten Aceh Selatan Dalam Angka, 2020)

Luas wilayah daratan Aceh Selatan adalah 4.173,67 Km² atau 417.367,7 Ha, yang meliputi daratan utama di pesisir barat selatan Provinsi Aceh. Sesuai dengan

penetapan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pembagian administrasi pemerintahan kabupaten/kota terdiri berturut-turut atas: kecamatan, mukim, dan gampong. Dengan demikian Wilayah Kabupaten Aceh Selatan secara administrasi pemerintahan terbagi atas 18 kecamatan, 43 Mukim dan 260 Gampong. Wilayah laut kewenangan sejauh 4 mil dari garis pangkal seluas 3.677,53 Km², wilayah udara di atas daratan dan laut kewenangan, serta termasuk ruang di dalam bumi di bawah wilayah daratan dan laut kewenangan. Luas wilayah administrasi Kabupaten Aceh Selatan yang dirinci menurut kecamatan seperti ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Wilayah Administratif Kabupaten Aceh Selatan, 2020

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas	Jumlah	
				Mukim	Gampong
1	Trumon	Keude	76.578,7	2	12
2	Trumon Tengah	Ladang Rimba	12.350,2	2	10
3	Trumon Timur	Krueng Luas	28.534,2	1	8
4	Bakongan	Keude	5.762,14	2	7
5	Kota Bahagia	Bukit Gadeng	24.463,2	2	10
6	Bakongan Timur	Pasie	7.381,19	1	7
7	Kluet Selatan	Suaq Bakong	10.658,2	3	17
8	Kluet Timur	Paya Dapur	44.902,9	2	9
9	Kluet Utara	Kota Fajar	7.323,68	3	21
10	Pasieraja	Kampung	9.811,37	2	21
11	Kluet Tengah	Koto	80.107,9	1	13
12	Tapaktuan	Tapaktuan	10.070,3	2	16
13	Samadua	Kasik Putih	11.290,6	4	28
14	Sawang	Meuligo	18.937,6	4	15
15	Meukek	Kuta Buloh	46.506,1	4	23
16	Labuhanhaji	Pasar Lama	5.482,51	3	16
17	Labuhanhaji	Peulumat	9.550,22	2	12
18	Labuhanhaji	Blang	7.656,10	3	15
Kabupaten Aceh		Tapaktuan	417.367,7	43	26

Sumber: Aceh Selatan Dalam Angka 2020

2. Gambaran Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Selatan penduduk pada tahun 2019 adalah 220.971 jiwa, dengan total jumlah kepala keluarga atau rumah tangga adalah 50.956 kepala keluarga/rumah tangga. Perkembangan jumlah penduduk beserta sebarannya menurut masing-masing kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2011 terjadi pemekaran kecamatan yang semula 16 kecamatan menjadi 18 kecamatan yaitu Kecamatan Kota Bahagia merupakan Kecamatan Bakongan dan Kecamatan Trumon Tengah pemekaran dari Kecamatan Trumon dan Trumon Timur, sehingga berpengaruh pada jumlah penduduk pada Kecamatan Trumon Timur dan Kecamatan Bakongan. Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2020 dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Kluet Utara (24.217 jiwa) dan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Trumon (4.683 jiwa).

Potensi penduduk yang besar merupakan faktor produksi dalam mendorong percepatan pembangunan. Di wilayah barat-selatan Aceh, Kabupaten Aceh Selatan memiliki potensi penduduk yang paling banyak. Dari total penduduk Aceh tahun 2014, paling kurang 4,5 persen mendiami di Kabupaten Aceh Selatan, tertinggi dibanding dengan kabupaten/kota di wilayah barat-selatan Aceh. Potensi penduduk tersebut harus didayagunakan secara optimal sehingga berkontribusi signifikan dalam mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Aceh Selatan. Pada Tabel 4.2 ditunjukkan komposisi penduduk Kabupaten Aceh Selatan menurut jenis kelamin, pada tahun 2017, 2018, 2019 sampai 2020. Dari tahun 2017 sampai 2020 jumlah penduduk perempuan lebih besar dari pada laki-laki. Komposisi

penduduk Aceh menurut kelompok umur selang lima tahunan pada tahun 2017 dan 2020 ditunjukkan pada Tabel 4.2. Kelompok umur yang terbesar jumlah penduduknya adalah kelompok 10-14 tahun, kemudian kelompok 5-9 tahun, dan selanjutnya kelompok 15-19 tahun.

Tabel 4.2
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Selatan 2017 – 2020

No	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Trumon	5.736	4.217	4.260	4,358	4.683
2	Trumon Timur	10.357	7.063	6.991	7,060	8.684
3	Bakongan	11.022	4.862	4.930	4,973	5.601
4	Bakongan Timur	5.210	5.218	5.240	5,251	5.457
5	Kluet Selatan	12.477	12.604	12.652	12,797	13.152
6	Kluet Timur	9.416	9.473	9.471	9,551	9.421
7	Kluet Utara	22,271	22.350	22.359	22,491	24.217
8	Pasieraja	15.721	15.762	15.761	15,953	17.258
9	Kluet Tengah	6.189	6.029	6.160	6,245	6.854
10	Tapaktuan	22.782	22.911	22.939	23,100	23.290
11	Samadua	14,557	14.758	14.877	15,058	15.962
12	Sawang	13,864	14.010	14.088	14,299	15.097
13	Meukek	18,207	18.326	18.608	18,779	19.098
14	Labuhan Haji	11.832	12.573	12.587	12,734	12.807
15	Labuhan Haji Timur	9.369	9.500	9.596	9,678	10.159
16	Labuhan Haji Barat	15.657	15.726	15.784	15,954	17.395
17	Trumon Tengah	-	5.400	5.448	5,476	5.415
18	Kota Bahagia	-	6.245	6.251	6,314	6.421
Aceh Selatan		204.667	207.025	208.002	210.071	220.971

Sumber : BPS Aceh Selatan 2020

B. Pola Kebijakan Anggaran dalam Sektor Pariwisata Di Kabupaten Aceh Selatan

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjalankan roda pemerintah di Kabupaten Aceh Selatan, seperti dalam pengelolaan tempat-tempat pariwisata yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dengan mewawancarai informan bisa didapat penjelasan bahwa pemerintah daerah terus berupaya melakukan pengelolaan tempat-tempat pariwisata agar lebih baik. Pihak Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah raga Kabupaten Aceh Selatan mengatakan bahwa :

“Pengelolaan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Aceh Selatan berangsur-angsur membaik, dalam pelaksanaannya, setiap program yang bertujuan pengembangan potensi wisata di Aceh Selatan terus dalam pengawasan dan transparansi supaya tidak terjadi penyalahgunaan apapun hal yang bisamenimbulkan konflik-konflik yang berimbas pada tidak maksimalnya pengelolaan tempat-tempat pariwisata”.

Kasi Objek dan Daya Tarik Wisata di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah raga Kabupaten Aceh Selatan mengatakan bahwa,

“Dalam pelaksanaannya pengelolaan pariwisata yang dilakukan pemerintah kabupaten aceh selatan sudah baik, banyak tempat-tempat wisata yang ada di berbagai wilayah aceh selatan sudah dikembangkan secara baik walaupun masih ada sedikit yang berjalan belum maksimal”.

Nini Anggraini selaku Kasi Usaha Jasa di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Selatan juga menambahkan :

“Pengelolaan pariwisata di Aceh Selatan banyak mengalami perkembangan, terbukti setiap di hari-hari tertentu tempat-tempat wisata yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Selatan selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun luar

daerah, pemerintah Aceh Selatan terus berupaya meningkatkan hasil yang maksimal dalam hal pendapatan asli daerah dari bidang pariwisata”.

Salah satu pemilik tempat penginapan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan juga mengatakan bahwa :

‘Pengelolaan pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan di beberapa tempat sudah bagus, namun masih ada beberapa tempat yang belum dikelola secara maksimal, seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Aceh Selatan bisa lebih lagi perhatian terhadap potensipotensi wisata di Kabupaten Aceh Selatan secara keseluruhan agar bisa meningkatkan pendapatan asli daerah, salah satunya melalui pajak tempat penginapan’.

Salah satu wisatawan yang menginap disalah satu tempat penginapan di Kabupaten Aceh Selatan menambahkan, “Secara keseluruhan pengelolaan pariwisata di Aceh Selatan belum ada perkembangan yang begitu berarti, ada beberapa tempat wisata di Aceh Selatan masih belum begitu di perhatikan perkembangannya oleh pemerintah daerah setempat, misalkan masih banyak sampah-sampah yang berserakan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa Pemerintah daerah memiliki perhatian yang besar terhadap pengelolaan potensi Pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan yang bisa meningkatkan pendapatan Asli Daerah untuk kebutuhan daerah itu sendiri. Dalam menjalankan tugas dan fungsi di daerah, Pemerintah daerah pasti memiliki kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk membuat perubahan yang lebih baik bagi daerah. Dalam mengembangkan pariwisata, banyak keuntungan yang dapat diperoleh, namun semuanya kembali kepada kesiapan daerah masing-masing untuk terus-menerus mengembangkan daerahnya sebagai salah satu daerah pariwisata. Dalam mengembangkan pariwisata, ada beberapa kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan pariwisata

yaitu, mengencarkan promosi, menyiapkan dan meningkatkan mutu pelayanan dan produk wisata, mengembangkan kawasan-kawasan pariwisata dan produk-produk baru dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kepariwisataan.

Potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Aceh Selatan juga menjadi prioritas bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan untuk terus membenahi segala aspek yang bisa menunjang untuk ke arah yang lebih baik. Pihak Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah raga Kabupaten Aceh Selatan mengatakan bahwa:

“Pemerintah banyak melakukan beberapa inovasi penting dalam mengatur strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan, seperti mempromosikan diri secara intens terhadap potensi-potensi wisata yang ada di Aceh Selatan, juga menganggarkan biaya khusus untuk pengelolaan tempat-tempat wisata”.

Kasi Usaha Jasa di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Selatan juga menambahkan “Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pihak-pihak atau instansi terkait menyangkut dengan pariwisata untuk terus mengembangkan potensi wisata yang ada di wilayah kabupaten aceh selatan dengan membuat kebijakan yang bisa meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke aceh selatan”.

Kasi Objek dan Daya Tarik Wisata di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Selatan mengatakan bahwa : “Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan pariwisata adalah dengan menertibkan pajak dan retribusi daerah, seperti pajak tempat penginapan yang akan menjadi pendapatan asli daerah yang selanjutnya akan digunakan pemerintah daerah untuk memajukan daerah, salah satunya dibidang pariwisata”.

Sementara Samsuar salah seorang wisatawan yang menginap di salah satu tempat penginapan menambahkan “Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Selatan terus berupaya mengembangkan potensi-potensi wisata yang ada di kabupaten aceh selatan dengan cara memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di tiap-tiap tempat wisata”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti melalui wawancara dengan informan bisa di peroleh kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan terus berupaya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa memberikan dampak positif terhadap potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Aceh Selatan.

Proses pengelolaan objek wisata di kabupaten Aceh Selatan mengalami hambatan yaitu kurangnya kucuran dana untuk pariwisata, walaupun sebagaimana mestinya plot anggaran untuk kepentingan pariwisata daerah itu sudah ada sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata (PERMENPAR) No 3 Tahun 2018 tentang petunjuk operasional pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pariwisata.

Pada pasal 1 Permenpar menjelaskan bahwa DAK fisik bidang pariwisata ialah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan bidang pariwisata yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.³⁸

Permenpar diatas menjelaskan bahwa ada perhatian khusus mengenai pengelolaan pariwisata di daerah, sehingga mempunyai anggaran khusus untuk itu,

³⁸ [Http://Www.Djpk.Kemenkeu.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2018/08/Permenpar-Nomor-3-Tahun-2018-Tentang-Dak-Fisik-Bidang-Pariwisata.Pdf](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/Permenpar-Nomor-3-Tahun-2018-Tentang-Dak-Fisik-Bidang-Pariwisata.Pdf) Diakses Pada 10 Juni 2020

dan ini merupakan tugas stack holder yang terkait dalam urusan melancarkan proses penganggaran untuk keperluan pariwisata ini. Namun, sebagaimana ditulis diatas, pengakuan dari beberapa pihak terkait anggaran untuk pariwisata itu tidak mencukupi.

*“Dalam konteks pariwisata konsekuensi bidang anggaran yang kita dorong pertama dari awal kita menginginkan adanya sebuah rancangan induk pembangunan pariwisata Aceh Selatan (RIPPARDA) yaitu dalam bentuk sebuah buku induk/qanun/peraturan daerah kita yang menerjemahkan arah pariwisata itu kemana. Tapi sampai dengan hari ini itu belum ada, terakhir sudah kita dorong juga di anggarkan namun persoalan teknis dan dinilai tidak cukup anggaran maka di keluarkan di tahun 2020 untuk membentuk sebuah ripparda”.*³⁹

Hal senada juga di ungkapkan oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah bapak erwiandi

Kepariwisataan kita ini belum begitu maksimal terkelola dengan baik, ini juga menyangkut keterbatasan anggaran dan hal-hal yang mungkin perlu di diskusikan kembali tentang kepariwisataan.

Dari penjelasan beliau, bisa kita pahami bahwa pemerintah kekurangan kucuran dana untuk pembangunan bidang pariwisata, padahal dari pengakuan Kasubag keuangan dinas pariwisata, dana itu jelas ada.

Dana otsus yang di berikan sebesar 3 Miliar, 2,5 Miliar untuk pembangunan ODTW gelombang 7 tahap 2 dan 500 juta untuk pelaksanaan gebyar nusantara di Jakarta. Dana alokasi Khusus (DAK) sebesar 1.024.575.000 untuk pembangunan sarana dan prasarana ODTW air dingin Bate Tunggal. Dan dari APBK sebesar 5.991.007.000.⁴⁰

³⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Hadi Surya ketua Komisi II DPRK Aceh Selatan (Sabtu 15 Februari 2020)

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan ibu Nini Anggraini Kasubag Keuangan Dinas Pariwisata Aceh Selatan (Selasa 14 Januari 2020)

Hal ini jelas kontradiktif dimana tidak ada kejelasan yang tetap pada masalah anggaran untuk pariwisata. Meskipun kita menyadari bahwa ada pembagian atau penguraian kembali mengenai anggaran pariwisata ini yaitu fisik dan non-fisik. Peneliti beranggapan bahwa ada politik anggaran atau “kalah lobi” dalam proses pencairan dana ini, atau dengan kata lain proses administrasinya tersendat.

Dana yang diberikan kepada Pemerintah Aceh Selatan melalui Dana otsus, Dana alokasi khusus dan APBK tidak tercukupi untuk mengembangkan potensi wisata yang ada, hanya mampu mengembangkan 1 objek wisata yaitu air dingin Bate tunggai. Yang hal ini berdampak pada keterbatasan gerak pemerintah untuk mengembangkan potensi wisata di Aceh Selatan.

Pengelolaan retribusi ini merupakan upaya dari pemerintah guna dalam menertibkan kawasan wisata yang ramai dikunjungi para wisatawan dan memberikan pemasukan kas pemerintah daerah serta masyarakat. Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya ialah melalui retribusi.

Retribusi merupakan pendapatan/penerimaan objek wisata melalui karcis masuk, parkir, pelayanan jasa yang telah sah dan disepakati antara pemerintah dengan pengelola.

Pembangunan perekonomian yang dimaksud disini ialah, masyarakat mendapat keuntungan dari hasil kerjasama dengan pemerintah dalam pengelolaan objek wisata di kabupaten Aceh Selatan. Keuntungan ini didapat karena masyarakat setempat merupakan pemilik tanah/lahan yang kemudian menerima bantuan dari pemerintah guna untuk meningkatkan minat wisata terhadap pengunjung.

Langkah awal dengan meningkatkan sarana dan prasarana objek wisata yang ada, jika sudah meningkat maka pengunjung akan merasa lebih

nyaman , setelah dilakukan pembangunan sarana dan prasarana kemudian lakukan promosi dan juga di dukung dengan avent-event acara.⁴¹

Disini strategi yang dilakukan dinas pariwisata pada awalnya ialah membangun sarana dan prasarana terlebih dahulu dan membuat kesepakatan dengan pengelola terkait retribusi. Dalam kerjasama ini, pemerintah memberikan fasilitas kepada pemilik tanah/lahan wisata tersebut berupa pembangunan mushalla, tempat parkir, jembatan penyeberangan, pagar, toilet, gapura, gazebo, papan himbauan, dan sebagainya.

Wawancara dengan bapak Hadi Surya selaku ketua komisi II DPRK Aceh Selatan mengungkapkan:

Nah jika sudah ada pariwisata yang patut untuk dipungut retribusi maka disini akan kita atur dan kembali pada qanun tentang retribusi. dan kita meminta pengusaha-pengusaha lokal untuk berani terjun di sektor pariwisata.⁴²

Dari pernyataan di atas strategi yang di lakukan DPRK ialah jika sudah ada pariwisata-pariwisata yang sudah patut untuk di pungut retribusi maka DPRK melakukan cara Persuasif kepada pengusaha-pengusaha lokal yang ada di Aceh Selatan untuk berkontribusi terhadap sektor pariwisata melalui pelayanan jasa hotel untuk pengunjung yang akan menginap di daerah tersebut, dengan adanya kios-kios kecil yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berbicara Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentu adanya kesepakatan yang di lakukan pemerintah terkait pemasukan kas daerah melalui retribusi, Pernyataan dari bapak Erwiandi Asisten I Sekretariat Daerah memberi tanggapan:

⁴¹ Hasil Wawancara dengan ibu Nini Anggraini Kasubag Keuangan Dinas Pariwisata Aceh Selatan (Selasa 14 Januari 2020)

⁴² Hasil Wawancara dengan Bapak Hadi Surya ketua Komisi II DPRK Aceh Selatan (Sabtu 15 Februari 2020)

Untuk pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi, Sekretariat Daerah tidak menetapkan nominal yang besar. tujuan utama Sekretariat Daerah bahwa objek wisata di Aceh Selatan harus lebih dikenal dahulu.⁴³

Apabila tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak besar artinya kegiatan yang dilakukan pemerintah tidak begitu banyak, maka oleh karena itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan memaksimalkan fasilitas penunjang objek wisata sehingga jika sudah terpenuhi maka PAD dapat untuk ditingkatkan.

Dalam teori kuasa apabila di terapkan proses penyelenggaraan politik anggaran dan pengelolaan retribusi objek wisata Aceh selatan disini sangat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proses penerapannya yang mana ketika dalam sebuah kekuasaan salah dalam mempergunakan fungsi kuasanya makanya akan sangat berdampak fatal terhadap proses penyelenggaraannya yakni mengapa demikian yang mana jika retribusinya ingin bagus dan mendapatkan keuntungan yang banyak maka objek wisata yang di tawarkan juga harus memiliki kualitas ekowisata yang bagus.

Dengan demikian peran pemerintah yakni melalui dinas pariwisata harus memang extra baik dalam segi pembangunan dan fasilitas di tempat tersebut harus lengkap dan memadai termasuk akses menuju tempat wisata tersebut, untuk menghasilkan keberhasilan yang bagus disinilah peran pemerintah dalam menggunakan kekuasaannya dengan benar agar tercapai pembangunan daerah wisata yang baik dan nyaman.

⁴³ Hasil Wawancara dengan Bapak Erwiandi Asisten I Sekretariat Daerah Aceh Selatan (Selasa 14 Januari 2020)

Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan dan mengatur urusan pemerintah daerah. Setiap daerah yang diberi otonomi dari pemerintah pusat berhak mengeluarkan kebijakan dalam mengurus pelayanan dan pengembangan pembangunan daerah.

Disini pemerintah daerah yaitu DPRK diberi kebebasan dalam mengeluarkan kebijakan baik dari regulasi, penganggaran dan pengawasan, melalui pembentukan perda (peraturan daerah) dengan persetujuan kepala daerah, yang tetap harus tunduk dengan nilai dan norma kontitusional UUD 1945.

Dalam konteks pariwisata pada awalnya kita menginginkan adanya sebuah rancangan induk pembangunan kepariwisataan (RIPARDA), Pada tahun 2019 sudah di anggarkan namun karena persoalan teknis tidak terlaksana, namun anggaran tersebut baru saja di keluarkan pada tahun 2020, program ini akan dilaksanakan ala kadarnya saja yang artinya tidak harus seluruh objek wisata di desain/rancang, tapi minimal ada 10 destinasi wisata yang bisa di tuangkan dalam RIPARDA tersebut.⁴⁴

DPRK sudah semaksimal mungkin dalam meningkatkan potensi objek wisata dengan cara bertahap untuk mengembangkan arah potensi wisata Aceh Selatan dengan melakukan terobosan-terobosan terhadap objek-objek yang akan di desain menjadi lebih baik dan agar nantinya pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi, melihat sejauh mana pencapaian-pencapaian dalam penerapan rancangan induk pembangunan kepariwisataan (RIPARDA) ini.

Di dalam beberapa hasil wawancara dengan ketua DPRK di bagian pariwisata secara panjang lebar, ketua DPRK mengatakan sudah semaksimal mungkin untuk mengevaluasi terhadap daerah-daerah ekowisata yang ada di Aceh Selatan, akan tetapi menurut hasil observasi yang peneliti lakukan langsung ke tempat-tempat

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Hadi Surya ketua Komisi II DPRK Aceh Selatan (Sabtu 15 Februari 2020)

wisata yang ada di Aceh Selatan itu banyaknya tempat wisata yang bagus namun sulitnya akses jalan dan fasilitas yang sangat kurang yang mana ini sangat memprihatinkan dan mempengaruhi kurangnya minat wisatawan yang datang sehingga berdampak besar salah satunya kurangnya retribusi yang di dapatkan kedalam pendapatan pemerintah daerah (PAD). Disini lah yang menjadi kelemahan di karnakan kurangnya retribusi tersebut kurangnya keinginan pemerintah dalam membangun serta mengembangkan objek wisata agar lebih menarik sehingga menjadi daya tarik terhadap wisatawan yang datang serta proses pembangunan yang di lakukan tidak adanya pemerataan yang di lakukan pemerintah Aceh Selatan. Jadi dari beberapa argumen yang dikeluarkan oleh ketua dprk tersebut hanya memenuhi kepentingan politis saja.

C. Kebijakan Alokasi Anggaran Dalam Sektor Pariwisata Di Kabupaten Aceh Selatan

Perkembangan pariwisata sangat berdampak pada perekonomian di daerah yang mengelola objek-objek wisata yang ada, hal ini dapat dilihat dari kesempatan kerja, meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat setempat yang bergerak di bidang industri pariwisata seperti transportasi, usaha kecil-kecilan dan jasa rekreasi tentunya.

Setelah dibangun sarana dan prasarana pada objek wisata yang ada, bahwa ada yang baru dengan objek wisata yang di promosikan dan juga event-event acara untuk meningkatkan daya tarik pengunjung, jadi adanya saling keterhubungan dari pembangunan dan promosi pemasaran (promosi).⁴⁵

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan ibu Nini Anggraini Kasubag Keuangan Dinas Pariwisata Aceh Selatan (Selasa 14 Januari 2020)

Pernyataan yang sama bapak Hadi Surya selaku Komisi II DPRK Kabupaten Aceh Selatan memberi tanggapan bahwa:

DPRK sangat mendorong bahwa Aceh Selatan sangat potensial untuk dikembangkan dalam hal sektor pariwisata, dengan melakukan promosi melalui media sosial, media elektronik dan media cetak tentang potensi wisata Aceh Selatan. di tahun 2020 ini akan di adakan sebuah video yang memaparkan indahnya potensi pariwisata di Aceh Selatan dan di tergetkan ada 7 destinasi wisata bahari yang di visualisasikan.⁴⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut Dinas Pariwisata Aceh Selatan dan DPRK dalam pengembangan objek wisata ialah dengan melakukan promosi, melalui website, media sosial, media elektronik dan media cetak. Hal ini dikarenakan promosi adalah sebuah sarana agar para wisatawan tahu bahwa Aceh Selatan mempunyai destinasi-destinasi yang menarik untuk dikunjungi, promosi wisata yang dilakukan seperti dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pameran atau pun event-event objek wisata.

Pengembangan pariwisata ini setiap tahun tetap di anggarkan seperti perbaikan-perbaikan objek daerah tujuan wisata (odtw) seperti tuan tapa yang dulu akses susah sekarang sudah diperbaiki untuk akses yang lebih mudah namun pelaksanaannya juga kurang bagus sehingga objek wisata ini di hantam gelombang dan rusak kembali. dalam kepariwisataan ini bukan hanya menjadi tugas pokok hanya pemerintah saja namun kita berharap ada sinergitas antara pemerintah masyarakat dan juga pihak usaha (swasta) ini yang diharapkan.⁴⁷

Pengelolaan objek wisata bukan hanya menjadi tugas dari pemerintah setempat, namun di perlukan adanya kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan juga pihak ketiga (swasta). Sejauh ini fasilitas sarana dan prasarana seperti

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Hadi Surya ketua Komisi II DPRK Aceh Selatan (Sabtu 15 Februari 2020)

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Erwiandi Asisten I Sekretariat Daerah Aceh Selatan (Selasa 14 Januari 2020)

parkir, toilet, mushala dan akses jalan masuk menuju ke objek-objek wisata memang ada beberapa yang sudah memadai akan tetapi lebih banyak yang tidak terpenuhi.

Pemerintah ingin mengembangkan potensi yang ada dengan sarana prasarana yang harus terpenuhi di banyak objek wisata kemudian baru di lanjutkan dengan promosi kepada masyarakat melalui segala media yang ada.

Hubungan masyarakat pengelola objek wisata dengan pemerintah Aceh Selatan dalam hal kerjasama dilakukan guna untuk terciptanya pemerintahan yang transparan dengan masyarakat yang memberikan efek positif untuk mewujudkan kinerja aparatur negara terhadap tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien salah satunya dalam pelaksanaan tata kelola kepariwisataan.

Dibutuhkan kerja sama ini melalui dukungan dan peran masyarakat sangat diperlukan untuk strategi-strategi yang pemerintah keluarkan sehingga akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Wawancara dengan masyarakat pengelola objek wisata Tapak Tuan Tapa menanggapi bahwa:

Adanya kerja sama pemerintah terhadap pengelola objek wisata apabila ada program yang di lakukan di tanah wisata milik pribadi ini, kami siap untuk membantu baik dengan pinjam ataupun semisalnya tergantung kesepakatan yang dilakukan. Tentunya kami melakukan retribusi untuk pendapatan asli daerah (PAD) dan tidak ada pertentangan pemerintah dengan pengelola objek wisata. Dan terhadap penyediaan/pengelolaan objek wisata bisa dikatakan memuaskan dan tidak memuaskan, bukan pemerintah yang salah akan tetapi ada oknum-oknum yang merusak sarana dan prasarana pada objek wisata ini.⁴⁸

Hal senada juga di ungkapkan oleh pengelola objek wisata Air Terjun Tingkat 7 menanggapi:

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan masyarakat pengelola objek wisata Tapak Tuan Tapa (Rabu 5 Februari 2020)

Tentu adanya kerja sama pemerintah dengan masyarakat pengelola objek wisata , yang tempat wisata ini adalah milik pribadi dan tentunya juga melakukan retribusi yang telah disepakati. Dan terhadap penyediaan/ pengelolaan objek wisata disini memuaskan tetapi fasilitas yang diberikan belum memadai seperti jembatan, lampu dan lainnya.⁴⁹

Hal serupa juga diakui oleh dengan pengelola objek wisata Air Dingin bahwa:

Kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat ada tetapi belum begitu maksimal, dan retribusi dalam hal ini tentunya juga telah disepakati bersama. Dan terhadap penyediaan objek wisata disini bisa dikatakan memuaskan juga bisa tidak memuaskan karna belum sepenuhnya fasilitas diberikan.⁵⁰

Disini dapat diasumsikan bahwa kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat terkait retribusi adanya perbedaan tanggapan pengelola objek wisata terkait kepuasan yang diberikan pemerintah mengenai penyediaan/pengelolaan sarana dan prasarana, Bisa dikatakan memuaskan dan juga tidak.

Dan pendapat asli Daerah melalui retribusi melebihi dari yang di targetkan dari hasil data

Yang ditargetkan untuk tahun 2019, 24.200.000 namun realisasi melebihi yang ditargetkan sejumlah 25.500.000.⁵¹

Dapat dilihat bahwa perlunya peran pemerintah dalam memaksimalkan terkait pengelolaan retribusi agar tercapainya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) guna untuk meningkatkan ekonomi daerah dan masyarakat setempat. Keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi tempat wisata sangat perlu dilaksanakan secara langsung untuk menjaga ketertipan dan mengurangi kerusakan di lokasi

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan masyarakat pengelola objek wisata Air Terjun Tingkat 7 (30 Januari 2020)

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan masyarakat pengelola objek wisata Air Dingin (17 Februari 2020)

⁵¹ Hasil Wawancara dengan ibu Nini Anggraini Kasubag Keuangan Dinas Pariwisata Aceh Selatan (Selasa 14 Januari 2020)

wisata tersebut perlu di lakukan baik secara individu maupun berkelompok dengan demikian secara tidak sadar peran masyarakat sangat besar ikut membantu program pemerintah sehingga dalam hal ini masyarakat juga diuntungkan oleh adanya daerah wisata yang bagus karena dapat mengembangkan usaha kecil menengah dalam masyarakat seperti meningkatnya daya beli kios-kios kecil serta adanya pemasukan dari parkir kendaraan yang di kelola oleh masyarakat di daerah objek wisata tersebut.

Masyarakat juga dapat menjual kreativitas baik itu berbentuk aksesoris/souvenir dan makanan ciri khas daerah tersebut dalam kegiatan usaha-usaha adanya arahan yang diberikan pemerintah kepada semua lapisan masyarakat sangat penting agar menunjang keberhasilan usaha-usaha masyarakat. Akan tetapi dari hasil pengamatan yang saya lakukan di daerah-daerah objek wisata di Aceh Selatan peran pemerintah dalam mengatasi kerusakan hanya sebatas himbauan saja yang berbentuk papan pamflet atau papan informasi yang di buat di daerah objek wisata tersebut akan tetapi secara langsung kontrol pemerintah sangatlah kurang.

Tidak adanya peraturan yang mengikat atau sanksi yang di buat oleh pemerintah dalam mengikat masyarakat setempat baik yang berjualan dan menjaga parkir kendaraan untuk saling bekerjasama dalam menjaga kebersihan dan perusakan di daerah-daerah tempat wisata tersebut.

Salah satunya contoh tempat wisata yang sangat menonjol yang ada di tapak tua setelah mengalami perombakan jalan untuk akses menuju ke tapak tersebut sudah bagus dan mudah di akses namun dalam pelaksanaan pembangunannya terjadinya masalah yang di buat oleh beberapa pihak pelaksana sebelumnya yaitu tindak pidana korupsi sehingga mengakibatkan tidak sempurnanya pembangunan

tersebut sehingga selang berapa tahun kerusakan fasilitas jalan tersebut sangat parah walau terjadi beberapa kali perhapian yang dilakukan oleh pengelola namun tidak maksimal karna terbatasnya anggaran pribadi. Disini dukungan dari pemerintah dalam mengeluarkan anggaran biaya rehabilitas fasilitas tempat wisata tersebut sangat kurang dan sangat terbatas. Untuk lebih jelasnya terkait jumlah anggaran penerimaan dan modal pembangunan objek wisata di Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Anggaran Penerimaan dan Pembangunan Sektor Pariwisata di Tapaktuan, 2015-2019

No	Penerimaan dan Pembangunan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Anggaran Penerimaan	Rp 75.307.135	Rp 85.877.336	Rp 87.414.398	Rp 87.999.000	Rp 89.414.395
2	Anggaran Pembangunan	Rp 24.000.786	Rp 36.220.784	Rp 44.414.300	Rp 51.999.000	Rp 50.890.000

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh selatan, 2020

Pada anggaran penerimaan dan pembangunan sektor pariwisata Tapaktuan, tidak semua pariwisata dapat di kembangkan hanya beberapa sektor pariwisata saja, disini dapat disimpulkan bahwa anggaran penerimaan dan pembangunan di Tapaktuan mengalami surplus karena di setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah anggaran baik anggaran penerimaan maupun anggaran pembangunan. Namun data statistik anggaran pada tabel diatas hanya menyimpulkan pengembangan anggaran di satu kecamatan saja. Jika di telusuri lebih mendalam masih banyak objek-objek wisata yang layak untuk di kembangkan.

Perkembangan sektor pariwisata di Aceh Selatan terus mengalami kemajuan, terutama yang terjadi pada 2 tahun belakangan ini yaitu tahun 2015, 2016 dan 2017.

Dimana pendapatan yang diperoleh pemerintah dibidang sektor pariwisata mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Keuangan dan Dinas Pariwisata Aceh Selatan adalah sebesar Rp 75,3 Juta dan itu dirincikan dari pendapatan yang dihimpun oleh Dinas Pariwisata sebesar Rp 47,4 Juta dan dari Dinas Keuangan senilai Rp 27,9 Juta. Sedangkan pada tahun 2016 berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Keuangan dan Dinas Pariwisata sebesar Rp 85,9 Juta dan dirincikan dari pendapatan yang dihimpun Dinas Pariwisata sebesar Rp 34,5 Juta dan dari Dinas Keuangan Rp 51,4 Juta bahkan pada tahun 2017 pendapatan yang dihimpun Dinas Pariwisata sebesar Rp 38,9 Juta dan dari Dinas Keuangan Rp 87,4 Juta Pada tahun 2018 pendapatan yang dihimpun Dinas Pariwisata sebesar Rp 88 Juta bahkan di tahun 2019 berdasarkan data Dinas Pariwisata diperoleh pendapatan sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp. Rp 89,4 Juta peningkatan pendapatan yang diperoleh dari bidang sektor pariwisata tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 disebabkan karena meningkatnya antusiasme masyarakat dan meningkatnya komponen kegiatan industri yang mendukung kemajuan sektor pariwisata.

Kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam proses pelaksanaan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) yang menyebabkan keterbatasan gerak pemerintah dalam mengelola keuangan daerah salah satunya melalui retribusi.

Lokasi objek wisata Aceh Selatan belum semua dikembangkan jadi dinas tidak bisa memungut pad di semua lokasi, hanya beberapa jadinya tidak terlalu maksimal, hanya objek wisata-objek wisata unggulan seperti tuan

tapa, air dingin, panjupian, kendalanya yaitu kurangnya dana untuk membangun sarana dan prasarana di semua objek lokasi.⁵²

Dalam penanganannya dapat dilihat adanya hambatan dan kendala yang dihadapi seperti kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang tidak berkembang dikarenakan masalah anggaran untuk pengembangan kualitas fasilitas yang ada dan kualitas sumber daya manusia yang mengelola objek wisata tersebut.

Dinas Pariwisata membuat nota kesepakatan (SK Pengelola) dengan pengelola objek wisata tersebut, hasil objek wisata yang di kelola masyarakat harus diretribusi kepada Pemerintah.⁵³

Dalam pelaksanaannya jika sudah adapun kesepakatan dari pemerintah dalam hal pengelolaan retribusi objek wisata dalam hal kepuasan tentunya bisa dikatakan puas dan juga tidak, hal ini di akibatkan adanya perusakan-perusakan terhadap objek-objek wista yang ada dari oknum- oknum masyarakat, memang jika perusakan berasal dari alam bisa untuk dimaklumi seperti banjir, tanah longsor dan yang lainnya, namun untuk perusakan ulah tangan manusia harus di perketat, dampak tersebut dapat merugikan semua pihak dan tentunya masyarakat itu sendiri.

Dan juga mengenai kepariwisataan kendala yang dihadapi berupa pandangan masyarakat terhadap pelanggaran syariat bukan hanya di satu tempat melainkan banyak objek wisata yang ada. Tanggapan Asisten 1 sekretariat Daerah Erwiandi mengatakan bahwa:

Mungkin perlu di diskusikan kembali tentang kepariwisataan ini khususnya dengan MPU karna terkadang asumsi masyarakat terhadap kepariwisataan ini identik dengan perbuatan yg melanggar syariat.⁵⁴

⁵² Hasil Wawancara dengan ibu Nini Anggraini Kasubag Keuangan Dinas Pariwisata Aceh Selatan (Selasa 17 Maret 2020)

⁵³ Hasil Wawancara dengan ibu Nini Anggraini Kasubag Keuangan Dinas Pariwisata Aceh Selatan (Selasa 14 Januari 2020)

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Erwiandi Asisten I Sekretariat Daerah Aceh Selatan (Selasa 14 Januari 2020)

Dilihat dari teori kuasa tentunya berbicara kepemimpinan dimana adanya konflik ini bisa dikatakan kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap objek-objek wisata yang ada, seharusnya pemerintah harus lebih tegas dalam hal pengelolaan dengan cara seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat setempat untuk menjaga setiap objek wisata yang ada di daerah masing-masing dan tidak hanya melimpahkan dengan pengelola untuk mengelola hal tersebut, dan pemerintah dapat memberikan sanksi yang tegas kepada oknum-oknum yang melakukan perusakan-perusakan objek daya tarik wisata (ODTW) yang ada di Aceh Selatan tentunya dengan peningkatan atau perbaikan dari berbagai program yang ingin dicapai.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

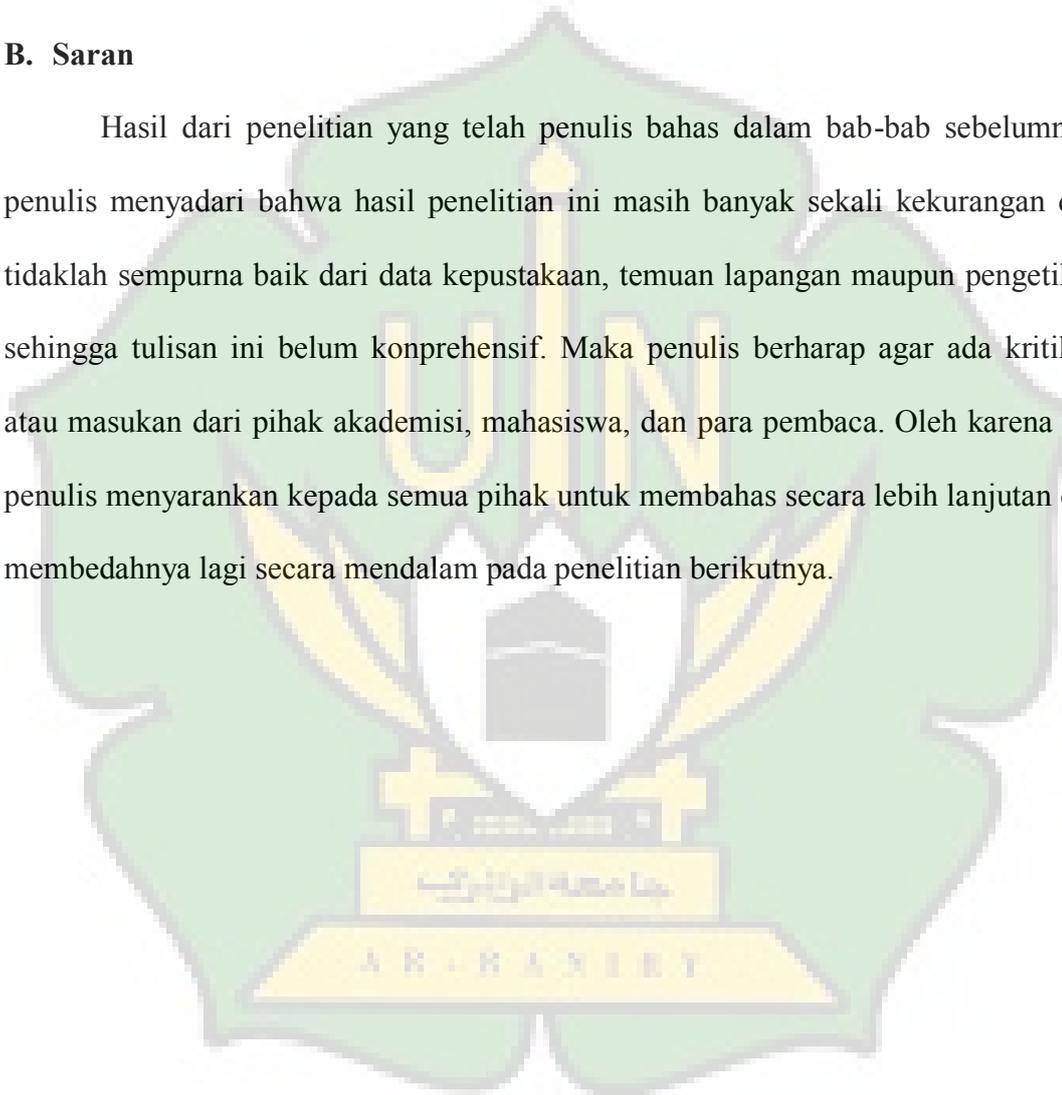
Berdasarkan hasil penelitiandan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran untuk pengembangan pariwisata di Kab. Aceh Selatan sangat minim. Pemerintah hanya dapat mengalokasikan dana dalam jumlah terbatas untuk pengembangan kawasan wisata tertentu saja. Dalam 5 tahun terakhir, masih banyak objek wisata yang belum dikembangkan dengan baik. Disamping itu, adanya beberapa hambatan dalam kebijakan pengembangan sektor pariwisata antara lain: interaksi antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat, aspek manajemen pembangunan sarana-prasarana, anggaran, aspek manajemen pemasaran dan promosi dan aspek SDM. Sehingga sangat perlu untuk mengambil upaya dan langkah profesional terhadap manajemen organisasi khususnya dalam desain dan proses penyusunan strategi yang tepat dan efektif.
2. Pola pelaksanaan retribusi objek wisata Aceh Selatan memang secara alamai masih memadai nan sangat bagus dan banyak di gandrungi khalayak ramai akan tetapi masih kurangnya bantuan dari pemerintah dalam hal anggaran terhadap pengembangan objek wisata yang ada di Aceh Selatan, hanya beberapa objek wisata yang dapat diterapkan retribusi dalam hal ini dapat berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD), kurangnya kontrol pemerintah dalam mengawasi pengelolaan objek wisata terhadap hal

pengawasan juga menjadi suatu hambatan, kurangnya ketegasan pemerintah dalam menerapkan sanksi bagi pelaksana pengembangan objek wisata agar proses administrasinya berjalan baik dan tentunya sanksi kepada oknum-oknum yang melakukan perusakan-perusakan pada objek wisata.

B. Saran

Hasil dari penelitian yang telah penulis bahas dalam bab-bab sebelumnya, penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih banyak sekali kekurangan dan tidaklah sempurna baik dari data kepustakaan, temuan lapangan maupun pengetikan sehingga tulisan ini belum komprehensif. Maka penulis berharap agar ada kritikan atau masukan dari pihak akademisi, mahasiswa, dan para pembaca. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada semua pihak untuk membahas secara lebih lanjutan dan membedahnya lagi secara mendalam pada penelitian berikutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dkk, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta : Salemba Empat, 2012
- Bambang Utoyo, *Bahan Kuliah Politik Keuangan Negara*, Lampung : Unila, 2013
- Basrowi& Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Haryanto, *Kekuasaan Elit : Suatu Bahasan Pengantar*, Yogyakarta, Politik Lokal dan. Otonomi Daerah, 2005.
- Heln Angga Devy dan R.B Soemanto, *Jurnal Sosiologi DILEMA*, Vol. 32, No. 1 Tahun 2017.
- [Http://Www.Djpk.Kemenkeu.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2018/08/Permenpar-Nomor-3-Tahun-2018-Tentang-Dak-Fisik-Bidang-Pariwisata.Pdf](http://Www.Djpk.Kemenkeu.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2018/08/Permenpar-Nomor-3-Tahun-2018-Tentang-Dak-Fisik-Bidang-Pariwisata.Pdf) Diakses Pada 10 Juni 2020.
- Ian Asriandy, Skripsi: *Strategi Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Bissapu Di Kabupaten Bantaeng*, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2016.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2009
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi, 2002.
- Marliyani, Skripsi: *Politik Anggaran dalam Kebijakan Infrastruktur di Kabupaten Tanggamus tahun 2015*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016.
- Mas'oed dan Nasikun, *Sosiologi Politik*, (Yogyakarta: PAU – Studi Sosial UGM, 1987.

- Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007).
- Moleong Laxy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2006).
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Erlangngga, 2009).
- Nafarin, *Penganggaran Perusahaan. Edisi ketiga, Cetakan kedua, Buku. 1.* (Jakarta : Salemba Empat, 2013).
- Nordiawan, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Kedua*. (Jakarta: Salemba Empat, 2011).
- Oman Sukirman, "Tourism and Hospitality Essentials (THE)" Journal, Vol. 7, No. 2, 2017.
- Robert, *Modern Political Analysis*, (New Delhi: Prentice-Hall of India Private Limited, 1974).
- Rotua Kristin Sinamora dan Rudi Salam Sinaga, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 4 (1) (2016).
- Rudianto, *Penganggaran*, (Jakarta : Erlangga, 2009).
- Rusnanda, *Kajian Potensi dan Rekomendasi Desa Lhokrukamberbasis Desa Wisata, Sebagai Alternatif Pembangunan Kota Tapaktuan, Jurnal Inotera Vol.1, No.1, Desember 2016.*
- Sasongko Catur dan Parulian, *Anggaran*, (Jakarta: Salemba. Empat, 2013).
- Setiawan, Andik. *Politik Anggaran: Kebijakan Dana Bagi Hasil Migas dalam APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015. Jurnal Politik Indonesia. Vol.2 No.1, Juli-September 2017.*
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Supriyono, *Akuntansi Manajemen. Edisi Ketiga*. (Yogyakarta: BPFE UGM, 2009).
- Wildavsky, *Dinamika Proses Politik Anggaran*, Yogyakarta : Matapena Consultindo, 2012.

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Judul : Politik Anggaran dan Pengelolaan Retribusi pada Objek Wisata di Aceh Selatan

WAWANCARA DENGAN INFORMAN

1. DINAS PARIWISATA

- a. Berapa pemasukan kas daerah dari pendapatan retribusi objek wisata di aceh selatan ?
- b. Bagaimana langkah yang akan dilakukan dinas pariwisata dalam mengembangkan bidang pariwisata di aceh selatan ?
- c. Apa strategi yang akan dilakukan oleh dinas pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi objek wisata di aceh selatan ?
- d. Apa kebijakan yang telah di lakukan dinas pariwisata untuk mengembangkan objek wisata di aceh selatan ?
- e. Apa faktor-faktor yang mengambat dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah aceh selatan melalui retribusi objek wisata ?

2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK)

- a. Bagaimana langkah yang akan dilakukan DPRK dalam mengembangkan bidang pariwisata di aceh selatan ?
- b. Apa strategi yang akan dilakukan oleh DPRK dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi objek wisata di aceh selatan ?
- c. Bagaimana kebijakan alokasi anggaran dalam sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan?
- d. Bagaimana bentuk kerja sama antara DPRK dengan masyarakat dalam hal mengelola tempat pariwisata ?
- e. Bagaimana pola kebijakan anggaran dalam sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan?

3. SEKRETARIAT DAERAH

- a. Bagaimana langkah yang akan dilakukan sekretariat daerah dalam mengembangkan bidang pariwisata di aceh selatan ?
- b. Apa strategi yang akan dilakukan oleh sekretariat daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi objek wisata di aceh selatan ?

- c. Apa kebijakan yang telah dilakukan sekretariat daerah untuk mengembangkan objek wisata di aceh selatan ?
- d. Bagaimana bentuk kerja sama antara sekretariat daerah dengan masyarakat dalam hal mengelola tempat pariwisata ?
- e. Bagaimana konsep pengelolaan tempat pariwisata yang dilaksanakan oleh sekretariat daerah aceh selatan ?

4. MASYARAKAT

- a. Apakah ada kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata
- b. Bagaimana bentuk kerja samanya ?



GAMBAR 5.1 DOKUMENTASI



(Wawancara dengan ibu Nini Anggraini 14 Januari 2020)



(Wawancara dengan Bapak Hadi Surya 15 Februari 2020)



(Wawancara dengan Bapak Erwiandi Selasa 14 Januari 2020)



(Wawancara Masyarakat Pengelola Objek Wisata Air Dingin Bate Tunggai)



(ODTW Air Dingin Bate Tunggai)



(Wawancara Masyarakat Pengelola Objek Wisata Tapak Tuan Tapa)



(Objek Wisata Tapa Tuan Tapa)



(Objek wisata Tapa Tuan Tapa)



(Pengelola Objek Wisata Pemandian Tingkat 7)



(Objek Wisata Pemandian Tingkat 7)



(Objek Wisata Air Terjun Air Dingin)